

**PENGARUH SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA
PERANGKAT NAGARI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

SEPRIMA YENTI

TM/NIM: 2015/15042047

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kinerja Perangkat
Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Seprima Yenti

Nim/TM : 15042047/2015

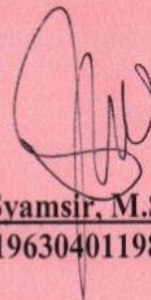
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2019

**Disetujui oleh:
Pembimbing**



Drs. Syamsir, M.Si Ph.D
NIP. 19630401198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019 Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

**Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam
Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Seprima Yenti
NIM : 15042047
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

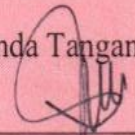
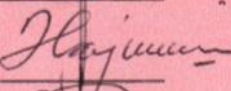
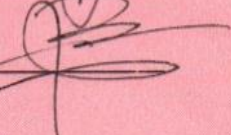
Padang, 13 Agustus 2019

Tim Penguji

Nama

1. Ketua : Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.
2. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.
3. Anggota : Aldri Frinaldi, SH. M.Hum. Ph.D

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seprima Yenti

NIM / TM : 15042047/2015

Tempat/ Tanggal Lahir : Pulau Karam /25 September 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Seprima Yenti
NIM. 15042047/2015

ABSTRAK

Seprima Yenti : Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh semangat kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam mengelola keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya semangat kerja perangkat Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Bayang sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan Nagari yang tidak optimal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan bentuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Bayang, yang berjumlah 140 responden. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 126 perangkat Nagari yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan menggunakan skala likert. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

Dari analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh sub variable tingkat absensi, kerja sama, kepuasan kerja dan kedisiplinan terhadap kinerja secara berurut adalah 4,1%, 26,9%, 2,8% dan 0,4% . Dapat disimpulkan bahwa sub variabel tingkat absensi, kerja sama dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari. Sedangkan sub variabel kedisiplinan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja perangkat Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari. Namun secara keseluruhan, semangat kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 29,5%,

Kata kunci: Semangat Kerja, Kinerja, Pengelolaan Keuangan Nagari

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehairat Allah SWT, yang mana atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum,. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang serta selaku dosen penguji II .
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian dan membimbing dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si selaku dosen penguji I yang telah memberikan masukan dan saran kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
6. Seluruh staff karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
7. Bapak/Ibu Wali Nagari sekabupaten Pesisir Selatan dan perangkat nagari yang telah berjasa memberikan izin pengumpulan data dan sekaligus pengisian data penelitian ini.
8. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Darli dan Ibunda Suryati terima kasih yang tak terhingga atas do'a, motivasi, pengorbanan dan ketulusannya mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Abang, Kakak dan adik tersayang Lisman, Lisri, Jumaidi, Jusriani, Pitriyana, Jefriadi dan Siti Aisyah yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
11. Teman-teman Sepenelitian 2018 dan 2019 yang berjuang mendapatkan gelar Sarjana
12. Sahabat seperjuanganku Ledita Anastasya, dan Deswinda Eka Putri yang telah bersedia memberikan waktu dan memberikan semangat tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2015,
Universitas Negeri Padang.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh kepada semuanya serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua baik bagi penulis maupun bagi pembaca hendaknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 13 Agustus 2019

Seprima Yenti

NIM. 15042047

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJUAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Konsep Kinerja.....	14
2. Semangat Kerja.....	20
3. Perangkat Nagari	28
4. Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari.....	30
5. Indikator Pengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari.	34
6. Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kinerja	36
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Konseptual	40

D. Hipotesis Penelitian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Operasionalisasi Variabel	43
D. Populasi dan Sampel Penelitian	46
E. Instrumen Penelitian	48
F. Jenis, Teknik , dan Alat Pengumpulan Data	49
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	51
H. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Temuan Umum	60
B. Profil Responden.....	63
C. Temuan Khusus	68
D. Pembahasan.....	89
E. Keterbatasan Penelitian.....	93
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Perangkat Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	47
2. Tabel Pengukuran Variabel	49
3. Uji Validitas Variabel Semangat Kerja	52
4. Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari	52
5. Uji Reliabilitas Variabel Semangat Kerja	54
6. Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari	54
7. Profil Responden Menurut Klasifikasi Umur.....	63
8. Profil Responden Menurut Jenis Kelamin.....	64
9. Responden Menurut Status Perkawinan.....	64
10. Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir.....	65
11. Profil Responden Menurut Jabatan	66
12. Profil Responden Menurut Pendapatan Bersih	66
13. Profil Responden Menurut Masa Kerja.....	67
14. Deskripsi Variabel Semangat Kerja	68
15. Deskripsi Variabel Transparansi	69
16. Deskripsi Variabel Akuntabilitas	70
17. Deskripsi Variabel Partisipasi	71
18. Deskripsi Variabel Tertib dan Disiplin Anggaran.....	72
19. Deskripsi Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari	73
20. Hasil Kontribusi (R) Variabel Tingkat Absensi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	74

21. Hasil Uji Anova (F) Variabel Tingkat Absensi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	75
22. Hasil Uji T Variabel Tingkat Absensi terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	75
23. Hasil Kontribusi (R) Variabel Kerja Sama terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	76
24. Hasil Uji Anova (F) Variabel Kerja Sama terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	77
25. Hasil Uji T Variabel Kerja Sama terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	77
26. Hasil Kontribusi (R) Variabel Kepuasan Kerja terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	78
27. Hasil Uji Anova (F) Variabel Kepuasan Kerja terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	79
28. Hasil Uji T Variabel Kepuasan Kerja terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	79
29. Hasil Kontribusi (R) Variabel Kedisiplinan terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	80
30. Hasil Uji Anova (F) Variabel Kedisiplinan terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	81
31. Hasil Uji T Variabel Kedisiplinan terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	81
32. Hasil Uji Multikoleniaritas Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	85
33. Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	86
34. Hasil Kontribusi (R) Pengaruh Variabel Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari	87
35. Hasil Uji Anova (F) Variabel Semangat Kerja terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	40
2. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Kabupaten 50 Pesisir Selatan.....	62
3. Hasil Uji Normalitas Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari ...	82
4. Hasil Uji Linearitas Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari ...	83
5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	84
6. Pengaruh dan Kontribusi Variabel X terhadap Y	89

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (Romdhoni, 2017). Adanya otonomi daerah merupakan suatu kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerahnya dengan lebih baik, yaitu lebih nyata dan bertanggungjawab. Pemberian kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara provinsi dan kabupaten/kota merupakan suatu bentuk penyelenggaraan dari otonomi daerah yang nyata. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga dijelaskan bahwa tugas pemerintahan daerah yang semakin berat sehingga harus dilimpahkan kepada daerah-daerah di bawahnya dalam hal ini adalah pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain seperti nagari di

Sumatra Barat, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan program dana desa sesuai dengan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Dana desa dimulai tahun 2014, merupakan bagian dari APBN yang di peruntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten /Kota. Dimana jumlah dana desa yang diterima oleh tiap desa tiap tahunnya berkisar 1.4 Milyar/Tahun/Desa. Namun besaran tersebut berbeda tiap desa sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing desa seperti jumlah penduduk, dan luas wilayahnya (Sopian Hadi, 2015). Dimana tujuan dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, namun lebih di prioritaskan kepada pelayanan dan pembangunan.

Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan pemerintah pada level pemerintah daerah. Sedangkan

Kebijakan tentang pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa juga merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, bahwasanya pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari adalah Walinagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) adalah unsur perangkat nagari yang diangkat oleh Walinagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan nagari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walinagari. Selanjutnya Bendahara Nagari adalah unsur staf Sekretaris Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausakan keuangan nagari. Asas pengelolaan keuangan nagari dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan, tak terkecuali pengelolaan keuangan nagari memiliki banyak sekali permasalahan, berupa pelanggaran atau penyimpangan mengenai penggunaan dana desa. Dari tahun 2012 sampai tahun 2017 POLRI

telah menemukan 214 kasus mengenai penyelewengan dana desa (Sohutoron Martahan, 2017). Selain itu ICW mencatat adanya peningkatan kasus korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran desa, ada sekitar 106 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2015 sampai September 2017, dengan menetapkan sebanyak 101 Kepala Desa dan 6 Perangkat Desa (Detik news:2017).

Sedangkan untuk daerah Provinsi Sumatera Barat sendiri dalam lima tahun terakhir, tercatat ada tiga puluh delapan Walinagari yang tersandung kasus korupsi dalam pelaksanaan keuangan nagari karena ketidaktahuan mereka tentang pengelolaan keuangan (BPKP, 2017). Seperti halnya 3 Walinagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang diduga pungli dan selewengkan dana desa, yaitu Walinagari Air Haji Tenggara, Walinagari Air Haji Barat dan Walinagari Koto Berapak (Antara Sumbar, 2017). Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan melakukan penahanan terhadap Walinagari Koto Berapak Naspi, S.H setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa di Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang. Walinagari Koto Berapak melakukan penyelewengan dana desa anggaran 2015-2016 kurang lebih Rp 900 juta. Hal ini diawali oleh pelaporan masyarakat karena ditemukan indikasi kecurangan penggelapan dana nagari dengan tidak adanya transparansi keuangan nagari, aset-aset nagari, beserta transparansi kinerja aparatur nagari (Utusanindo.com, 2018).

Masalah lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan nagari yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat keterlambatan dalam pencairan Dana Desa. Hingga pada Bulan Mei 2018 lalu, baru 20% Dana Desa (DD) yang telah

dicairkan pada nagari. Keterlambatan tersebut menurut Kepala Bidang Pemerintahan Nagari terkait dengan belum keluarnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. Sebab, tahun 2018 alokasi DD Pesisir Selatan mengalami peningkatan hingga Rp 200 juta, yaitu pada tahun 2017 Rp 145,7 Miliar meningkat menjadi Rp 145,9 Miliar pada tahun 2018, sehingga perlu ada Perbup yang barunya dulu (Portal Berita Pessel, 2018).

Selain itu permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari yang peneliti temukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di beberapa Kantor Walinagari di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu seperti keterangan Sekretaris Nagari Setara Nanggalo Pada Senin 27 Maret 2019 yang mengatakan permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu masih kurangnya sarana dan prasana dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu masih belum adanya Wifi kantor serta jaringan internet yang masih belum lancar sehingga menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari dan penyelesaian pekerjaan. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Nagari Gurun Panjang Bayang, yaitu masih lemahnya jaringan internet sehingga terkadang menghambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, serta masih kurangnya Bimtek dalam pengelolaan keuangan nagari, dan juga masih adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah nagari dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan nagari. Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Rahmadi (2017) juga ditemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu seperti keterlambatan pencairan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan, kesalahan dalam penatausahaan keuangan dan pembuatan surat pertanggungjawaban, serta keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Walinagari Talaok Senin 18 Maret 2019 mengatakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu masih kurangnya media yang digunakan sebagai penyebarluasan informasi pengelolaan keuangan nagari dan sosialisasi yang masih kurang memadai untuk diakses secara terbuka oleh umum, dan masih seringnya terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan. Dan juga permasalahan pengelolaan keuangan nagari yang peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan kaur keuangan nagari kapuh utara yaitu permasalahan terkait dengan penganggaran, yaitu ketiadaan anggaran untuk membiayai penyusunan design dan RAB. Sehingga tak jarang design dan RAB serta dokumen lainnya disusun asal jadi.

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari adalah sumber daya manusianya. Kemampuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kinerja yang dicapai serta kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya (Harahap, 2016). Dalam proses pengelolaan keuangan melalui semangat kerja yang tinggi diharapkan tercapainya tujuan sehingga meningkatnya Kinerja Perangkat Nagari. Menurut Siswanto (2001), semangat kerja merupakan suatu kondisi rohaniah atau perilaku individu tenaga kerja dan kelompok-kelompok yang menimbulkan kesenangan

dalam diri pekerja untuk meningkatkan kinerjanya dan konsekuensi dalam mencapai tujuan dan aturan niat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai semangat kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena ia akan melakukan pekerjaan dengan lebih giat, sungguh-sungguh, berdisiplin, mencerminkan hasrat dan intensitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk meningkatkan semangat kerja pengelola keuangan nagari maka perlu dengan pemberian insentif atau perangsang untuk kepuasan kerja dari pengelola keuangan nagari itu sendiri. Dimana kita ketahui bahwa tugas pengelola keuangan nagari ini merupakan suatu pekerjaan yang memiliki tanggungjawab dan resiko yang besar, dimana jika salah tulis/salah ketik saja harus di ulang kembali, tentu akan memakan waktu dan tak jarang juga pengelola keuangan nagari ini sering lembur dalam penyelesaian tugasnya. Dan juga bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan nagari ini yang membawa hukum maka yang pertama kali diperiksa adalah pengelola keuangannya. Maka sudah seharusnya pengelola keuangan ini mendapatkan insentif agar memiliki semangat kerja yang tinggi serta merasa puas terhadap kerjanya. Namun menurut hasil observasi peneliti di beberapa nagari di kabupaten Pesisir Selatan masih terdapat banyak perangkat nagari yang belum puas terhadap gaji dan insentif yang diterima. Seperti yang dikatakan oleh Walinagari Talok Bayang pada wawancara Senin 18 Maret 2019, yaitu masih kurangnya kepuasan kerja dari perangkat nagari dimana gaji yang diperoleh masih belum sesuai dengan beban kerja yang ditanggung.

Menurut Flipppo dalam Syahropi (2016), faktor-faktor untuk mengukur semangat kerja adalah tingkat absensi, kepuasan kerja, kerjasama dan kedisiplinan. Sehingga dengan adanya indikator pengukur semangat kerja dapat mengetahui bagaimana semangat kerja mampu mempengaruhi kinerja pegawai, terutama kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari sesuai asas yang di atur undang-undang yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas serta tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan tepatnya di Kantor Walinagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan pada hari Senin 1 April 2019, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi semangat kerja perangkat nagari diantaranya, yaitu: masih kurangnya tingkat kehadiran dan kedisiplinan dari perangkat nagari sehingga masih terdapat beberapa perangkat nagari yang mendapat surat teguran dari Camat Koto XI Tarusan. Kemudian juga dari sisi jam tutup kantor Walinagari Kapuh Utara sering tutup di awal waktu yaitu seperti jam 15:00 WIB kantor sudah tutup. Padahal bila merujuk kepada Peraturan Bupati terkait tentang kedisiplinan dan jam tutup kantor Walinagari yaitu pukul 16:00. Kemudian juga terkait dengan indikator kerjasama, yaitu seperti keterangan Sekretaris Nagari Pasar Baru Bayang pada Senin 11 Maret 2019 yang mengatakan masih kurangnya kerjasama antara rekan kerja, dimana dalam hal pembuatan laporan pertanggung jawaban sering terlambat karena sering tidak tepat waktunya penyelesaian laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan bahwa terdapat hasil penelitian yang menyatakan semangat kerja berpengaruh secara signifikan/positif terhadap kinerja seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahropi (2016) dengan judul Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bangkinan Di Pekanbaru. Selain itu penelitian Handayani (2016) yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Semangat Kerja terhadap Kinerja PNS Balitsa Lembang dengan hasil penelitian yaitu lingkungan kerja dan semangat kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Senada dengan hal tersebut, Pratama dan Wardani (2017) meneliti tentang Pengaruh Kemampuan Kerja dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kenadal), dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa kemampuan kerja, semangat kerja, dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan pengaruh sebesar 50,9%; sisanya 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini.

Namun pada penelitian terdahulu juga terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa semangat kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, seperti penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2016) yang berjudul Pengaruh Semangat Kerja Dan Disiplin kerja Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 hasil penelitian diperoleh Semangat kerja (X1) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja pegawai, dengan koefisien regresi sebesar -0,227 yang artinya apabila semangat kerja

meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja akan menurun sebesar -0,227 satuan dengan asumsi bahwa variabel semangat kerja (X2) dalam kondisi konstan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat dua hasil penelitian yang berbeda dengan variabel yang sama, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan dengan judul **“Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan”**. Penelitian ini merupakan intisari dari hasil penelitian skripsi dan penelitian payung yang dilakukan oleh Syamsir (2017) dengan judul *Model Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar*.

B. Identifikasi masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya kasus Walinagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
2. Terdapat keterlambatan dalam pencairan dana desa tahap I anggaran tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Masih adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah nagari dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan nagari.
4. Masih kurangnya sarana dan prasana dalam pengelolaan keuangan nagari sehingga menghambat dalam penyelesaian pekerjaan.

5. Masih terdapat nagari di kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami ketiadaan anggaran untuk membiayai penyusunan design dan RAB.
6. Masih kurangnya pelatihan atau bimtek dalam pengelolaan keuangan nagari.
7. Kurangnya media yang digunakan sebagai penyebarluasan informasi pengelolaan keuangan nagari dan sosialisasi yang masih kurang memadai untuk diakses secara terbuka oleh umum.
8. Masih seringnya terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan
9. Masih kurangnya tingkat kehadiran dan kedisiplinan dari perangkat nagari sehingga masih terdapat beberapa perangkat nagari yang mendapat surat teguran dari Kantor Camat terkait.
10. Masih kurangnya kepuasan kerja dari perangkat nagari, dimana gaji yang diperoleh masih belum sesuai dengan beban kerja yang ditanggung.
11. Masih kurangnya kerjasama antara rekan kerja, dimana dalam hal pembuatan laporan pertanggung jawaban sering terlambat karena sering tidak tepat waktunya penyelesaian laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang dilakukan.
12. Banyaknya perangkat nagari yang telat masuk kantor ataupun tidak ada di kantor pada saat jam kerja.

C. Batasan Masalah

Mengingat cukup luasnya permasalahan di atas dan juga karena cukup luasnya daerah cakupan Kabupaten Pesisir Selatan, maka peneliti membatasi daerah penelitian ini di 2(Dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang. Dengan pertimbangan pemilihan 2 Kecamatan tersebut yaitu

terkait masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan di 2 (dua) Kecamatan tersebut, seperti ditemukannya indikasi penyelewengan Dana Desa di Kecamatan Bayang dan sering terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan di beberapa Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan serta juga karena keterbatasan tenaga, dana serta waktu saat penelitian, maka penelitian ini tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan di identifikasi masalah. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah pengaruh semangat kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya yaitu “Apakah terdapat Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Semangat Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan”.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Keuangan Publik.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perangkat nagari, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan nagari.
- b. Bagi Walinagari, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan semangat kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan nagari. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki semangat kerja perangkat nagari demi meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan nagari.
- c. Bagi peneliti, secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi.